

SUKOHARJO—Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mencium aroma korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo yang saat ini mangkrak.

Ivan Andimuhtarom
redaksi@solopos.co.id

Kesimpulan itu didapat setelah PKBH FH UGM menggelar pertemuan segitiga dengan Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) dan kontraktor, PT Ampuh Sejahtera, Rabu (21/5). Sebelumnya, pada Jumat (2/5), PKBH FH UGM juga telah menggelar audiensi dengan Pemkab.

Ketua tim PKBH FH UGM, Totok Dwi Diantoro, saat dihubungi *Espos*, Kamis (22/5), menyatakan timnya telah menggali banyak informasi dari kontraktor dalam pertemuan di kantornya Rabu itu. Menurut dia, banyak temuan menarik yang berhasil didapat dari pertemuan tersebut, di antaranya komitmen Pemkab Sukoharjo dinilai tidak konkret dalam menyelesaikan proyek pasar.

"Ada permasalahan di Pemkab Sukoharjo, khususnya pada masalah pengadaan. Kami mencium aroma kuat korupsi dalam proyek itu," ujar dia.

Menurut Totok, anggota HPPKS yang datang berkukuh segera mendaftarkan gugatan perdata terhadap Pemkab Sukoharjo ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo. Namun, materi gugatan harus dibahas lebih dulu di tim PKBH UGM. "Penyusunan draf materi gugatan bisa cepat. Tapi teman-teman [anggota tim] harus menghitung kerugian yang diderita pedagang. Kerugian imaterial juga akan dihitung," kata dia tegas.

Lebih lanjut, PKBH FH UGM selaku kuasa hukum pedagang akan melakukan dua pendekatan kepada Pemkab. Pertama, melakukan gugatan. Kedua, memberikan tekanan-tekanan kepada Pemkab Sukoharjo dengan berbagai saluran.

"Kami akan minta percepatan komitmen Pemkab. Kami juga akan melaporkan hal ini ke Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]."

▶ **Tim PKBH UGM selaku kuasa hukum pedagang menilai ada masalah saat pengadaan dalam proyek Pasar Ir. Soekarno.**

▶ **Pedagang berkukuh menggugat Pemkab.**

PKBH UGM Cium Aroma Korupsi

Pesimistis

Ketua tim penggugat HPPKS, Sumarsono, saat ditemui wartawan di pasar darurat, Kamis, mengatakan pihaknya mendorong PKBH segera mendaftarkan gugatan ke PN Sukoharjo. Pasalnya, pedagang sudah pesimistis Pasar Ir. Soekarno bisa selesai dalam waktu dekat.

"Kami tetap menggugat karena dirugikan selama dua tahun lebih. Nilai gugatan sekitar Rp2 miliar berupa kerugian materiil dan imateriil. Sebelum puasa [Ramadan] kami berharap gugatan sudah didaftarkan," papar dia.

Ia menegaskan tak mau ambil pusing dengan sengketa antara Pemkab Sukoharjo dengan PT Ampuh Sejahtera. "Kalau mau perang, silakan. Kami tidak mau ambil pusing. Yang jelas, pedagang minta ganti rugi. Informasi terakhir, jumlah pedagang berkurang, enggak jualan. Ibarat air, mereka menguap," ungkap dia.

Ketua HPPKS, Fajar Purwanto, berpendapat Pemkab dan kontraktor tidak serius menyelesaikan sengketa di antara mereka. Menurut dia, kedua pihak seharusnya bisa menjaga ego masing-masing. "Jangan saling menyalahkan dan jangan merasa benar, lupakan kepentingan pribadi atau golongan. Utamakan kepentingan umum. Jangan pedagang dan masyarakat yang dikorbankan," urai dia dalam pesan singkat kepada *Espos*, Kamis.

Sementara itu, Sekda Sukoharjo, Agus Santosa, membenarkan ada kasus dugaan korupsi pada proyek pasar. Menurut dia, sudah ada pihak yang melaporkannya ke KPK. Namun, ia mengaku belum mengetahui pihak yang bersalah dalam kasus itu. "Ya ditunggu saja proses selanjutnya," tulisnya dalam pesan singkat yang diterima *Espos*, Kamis.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo, A.A. Bambang Haryanto, tak merespons permintaan *Espos* untuk wawancara baik soal dugaan adanya korupsi maupun soal permintaan PT Ampuh Sejahtera agar lelang dihentikan.